

SERTIFIKASI DAN KOMPETENSI PUSTAKAWAN ANTARA TANTANGAN DAN HARAPAN

Wiji Suwarno

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

ABSTRAK

Pustakawan adalah sebuah profesi yang memerlukan pengakuan dari masyarakat terkait dengan eksistensi dan tugasnya. Pustakawan tidak lagi disebut sebagai profesi yang mutlak menjaga buku. Melainkan profesi yang tidak saja mampu mengorganisasikan bahan pustaka, lebih dari itu pustakawan menjadi mitra posisitif para pelaku pengetahuan dalam rangka pengembangan kompetensi akademik, perilaku dan sikapnya. Artikel ini mengangkat tema sertifikasi dan kompetensi pustakawan. Berharap artikel ini bisa dijadikan titik picu berfikir pustakawan agar tidak terjebak pada kungkungan pekerjaan teknis yang selama ini menjadi stigma yang menghambat perkembangan pustakawan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah mix-methode yang mengambil beberapa informan kunci sebagai pengklarifikasi berbagai pertanyaan yang menyangkut sertifikasi dan kompetensi ini. Simpulan dari penulisan ini bahwa pustakawan era sekarang dalam pengembangan kompetensi mampu menjadi pengajar, peneliti, pengelola taman baca masyarakat, wira usaha, dan juga menjadi penulis. Guna menjaga kekokohan profesi dan kompetensi, diperlukan tanda sahnyanya menguasai kompetensi yaitu dengan dimilikinya sertifikat tanda lulus dalam ujian sertifikasi/ kompetensi pustakawan.

Kata kunci: kompetensi pustakawan, pengembangan profesi, sertifikasi pustakawan.

1. PENDAHULUAN

Sebuah profesi memerlukan tempat dan atensi di hati masyarakat wilayah keprofesiannya. Hal ini sebagai penanda bahwa profesi tersebut diterima dengan baik dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pengakuan ini tentu tidak semata-mata sebagai pengukuhan dari eksistensi sebuah profesi, lebih dari itu adalah “keberdayaan” profesi. Logisnya, jika sebuah profesi sudah diakui oleh masyarakat, maka eksistensi dan kebedayaannya tidak perlu dipertanyakan lagi.

Hal inilah sesungguhnya yang sedang diupayakan oleh pustakawan di Indonesia. Sebagaimana dimaklumi bersama, eksistensi pustakawan di Indonesia masih dalam ranah “meragukan” keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Profesi ini ada, tetapi gaungnya masih dalam lingkup terbatas. Masyarakat awam memahami pustakawan sebatas *the guardian of books* saja. Dipihak lain pustakawan seperti merasa gemas ketika disentuh oleh anggapan semacam itu. Seperti tidak terima dikatakan hanya penjaga buku, tetapi mau menunjukkan bahwa ia mampu melakukan lebih dari itu, menemui jalan buntu untuk mengikis stigma itu. Jangankan masyarakat, tidak sedikit pimpinan pada tempatnya bekerja dan mengabdikan diri sebagai pustakawan, belum sepenuhnya memahami porsi dan posisi positif pustakawan. Tidak jarang di perpustakaan sekolah pustakawan diminta untuk menangani pekerjaan non kepustakawanan. Tidak sedikit pustakawan di institusi diberi job yang tidak relevan dengan tugas dan fungsinya sebagai seorang pustakawan.

Niat baik pemerintah dalam hal ini Perpustakaan Nasional RI selaku pembina dan payung seluruh perpustakaan dan pustakawan secara nasional, mengadakan sertifikasi pustakawan secara nasional sebagaimana yang terjadi pada guru dan dosen sebagai upaya mendudukkan profesi pustakawan di titik yang semestinya. Karenanya program sertifikasi dan uji kompetensi pustakawan perlu diikuti oleh semua pustakawan secara nasional, agar profesi ini memiliki “ruh” yang nyata-nyata mampu menghidupkan keilmuan untuk bangsa ini dan menjadi titik balik fungsi pustakawan menuju

tugas dan fungsi yang sebenarnya.

Menariknya dari makalah ini adalah mencermatai berbagai peristiwa fenomena sertifikasi dan kompetensi pustakawan di berbagai wilayah Indonesia di era sekarang yang didekati secara fenomenologis, diteliti dengan menggunakan *mix-methode*, disajikan datanya secara deskriptif. Sedangkan untuk informan diambil secara random sebagai penguat informasi yang diperlukan dalam mendukung penulisan ini.

2. SERTIFIKASI DAN KOMPETENSI PUSTAKAWAN DALAM KERANGKA HARAPAN DAN TANTANGAN

2.1. Sertifikasi dan harapan pustakawan

Teringat sebuah film *adventure* yang menyajikan adegan ketika suatu kelompok petualang telah lama berjalan di kegelapan, tiba-tiba sebagian darinya melihat kalau di ujung mata memandang terlihat seperti ada titik cahaya. Bahagia dirasakan, senyum mulai mengembang, sesaknya kegelapan perlahan sedikit demi sedikit terlupakan.

Seperti itulah kira-kira posisi pustakawan saat ini. Setelah lama menyandang “gelapnya” status pustakawan sejak lulus dari bangku kuliah sampai dengan berbaur dengan rutinitas pekerjaan, cahaya terang keprofesiannya belum terlihat jelas. Sejak ditetapkannya UU No. 43 tahun 2007 sampai kini diterbitkannya Penetapan SK Menakertran RI Nomor 83 Tahun 2012 dan SK Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 236 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perpustakaan merupakan kabar baik bagi Pustakawan. SKKNI tahun 2012 dan tahun 2019 ini seperti semburat kuning cahaya harapan yang mulai terlihat.

Lembaga Sertifikasi Pustakawan (LSP) yang dibentuk oleh perpustakaan nasional RI, merancang program untuk melakukan sertifikasi terhadap profesi pustakawan agar pustakawan di Indonesia ini mendapatkan pengakuan secara formal bahwa pustakawan layak disebut sebagai profesi karena telah menguasai kompetensi yang distandarkan secara nasional. Tujuan sertifikasi

Pustakawan ini bisa ditinjau dari dua aspek, pertama adalah untuk perpustakaan sebagai lembaga tempatnya bekerja, dan kedua dari aspek pustakawan sebagai profesi.¹

Melihat argumen dari beberapa informan yang telah mengikuti program sertifikasi, diperoleh keterangan bahwa sertifikasi jika dilihat dari aspek perpustakaan sebagai institusi tempat pustakawan bekerja, setidaknya ada nilai positif sebagai berikut: *pertama*, sertifikasi ini membantu perpustakaan meyakinkan kepada pemustaka bahwa pelayanan perpustakaan dilakukan oleh tenaga yang kompeten. Dengan demikian perpustakaan bisa lebih percaya diri menyediakan fasilitas layanan yang berorientasi pemenuhan kebutuhan pengguna dengan baik dan benar.

Kedua, sertifikasi dapat membantu perpustakaan dalam rekrutmen atau penyaringan tenaga kerja dan mengembangkan tenaga kerja berbasis kompetensi. *Ketiga*, sertifikasi dapat memastikan perpustakaan mempunyai tenaga yang kompeten. *Keempat*, sertifikasi membantu perpustakaan pengembangan karir pustakawan, dan *kelima*, sertifikasi bisa untuk memastikan dan meningkatkan produktivitas pustakawan.

Senada dengan itu, menurut Shonrock melihat ada manfaat “sertifikasi” kompetensi dalam suatu bidang pekerjaan, dilihat dari porsinya sebagai individu, yaitu: mendorong pegawai (baca: pustakawan) untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang operasional bidang kerjanya (baca: perpustakaan), memotivasi pustakawan agar memenuhi syarat untuk kemajuan dalam struktur perpustakaan, dan memberi rasa percaya diri pada pustakawan bahwa kinerja mereka berperan dalam pelayanan publik yang berkualitas dan selalu ingin memberikan layanan yang terbaik.²

Dari argumen ini disimpulkan bahwa sertifikasi ini penting bagi pustakawan meskipun secara finansial belum dapat diaktakan berpengaruh secara langsung. Namun demikian setidaknya dengan

¹ Muhammad Sabri Ali, “Sertifikasi Profesi Pustakawan Barometer Kompetensi Dan Produktivitas Pustakawan,” *Jupiter* 14, no. 2 (2015): 59.

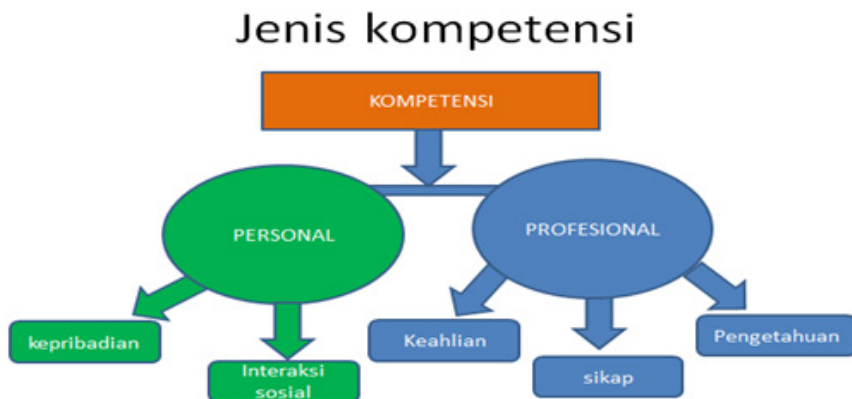
² Joyce Lindstrom and Diana D. Shonrock, “Faculty-Librarian Collaboration to Achieve Integration of Information Literacy,” *Reference & User Services Quarterly* 46, no. 1 (2006): 20.

sertifikasi pengakuan terhadap profesi ini sudah terjadi secara legal formal, dan secara psikologis, kepercayaan diri pustakawan sebagai profesi perlahan mulai terbangun.

2.2. Kompetensi pustakawan

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sekarang ini menuntut kecakapan pustakawan agar bisa mengikuti perkembangan ini tanpa terpengaruh oleh istilah *disruption*. Pustakawan tidak perlu khawatir tergantikan oleh perangkat mesin atau yang lainnya buatan manusia, selama pustakawan ini mendudukkan diri sebagai manusia yang berfikir dan selalu mengembangkan potensi dirinya. Mesin hanya bisa bekerja mekanikal tanpa logikal, sedangkan pustakawan sebagai *human thinking*, yang bisa berlogika dan “merasa”, tidak akan bisa digantikan dan disamai oleh mesin.

Secara umum, menurut PP No. 24 tahun 2014 pasal 34, kompetensi pustakawan ini ada di dalam dua kategori, yaitu kategori personal dan profesional. Berikut bagan kompetensi pustakawan menurut PP ini:



Gambar 1; Jenis Kompetensi

(sumber: PP No. 24 tahun 2014 pasal 34)

Dapat diterangkan disini bahwa kompetensi personal meliputi kepribadian dan interaksi sosial. Sedangkan kompetensi profesional meliputi tiga hal, yaitu: pengetahuan, sikap, dan keahlian. Di tengah kecamuk perkembangan IT yang luar biasa ini, Corral berpendapat bahwa seorang pustakawan yang adaptif adalah pustakawan yang mampu menggabungkan keahlian tradisional kepustakawanan dengan keterampilan memaksimalkan *hardware* atau *software* teknologi informasi, dan memiliki kemampuan membuar rancangan pengajaran atau pendidikan sebagai upaya menerapkan teknologi secara tepat sesuai dengan kebutuhan.³ Kompetensi ini yang sesungguhnya menjadikan pustakawan ini unik, dan jarang dimiliki oleh profesi lain. Namun demikian lagi-lagi pada progresifitas pustakawan itu sendiri yang akan menentukan suatu keunikan pada dirinya.

Pada perkembangannya, survei yang sudah dilakukan menunjukkan hasil yang menginformasikan adanya berbagai kompetensi yang dimiliki pustakawan pada era sekarang ini:

- 1) Pustakawan menjadi pengajar
- 2) Pustakawan menjadi peneliti
- 3) Pustakawan pengelola jurnal ilmiah
- 4) Pustakawan menjadi penyelenggara taman baca masyarakat
- 5) Pustakawan menjadi wirausahawan
- 6) Pustakawan menjadi penulis⁴

Adalah sesuatu hal yang menarik apabila diperhatikan dari jenis kompetensi yang sekarang ini dimiliki pustakawan. Mengajar, meneliti, mengelola jurnal, dan menulis adalah aspek akademis yang sebenarnya tepat disematkan untuk profesi dosen. Mengelola taman baca dan wirausaha tepat kiranya jika disandang oleh profesi ekonom. Persoalannya bukan siapa yang pantas dengan kompetensi tersebut, melainkan siapa yang memiliki peluang dan sanggup menjawab tantangan perkembangan zaman sebagaimana dirasakan sekarang ini.

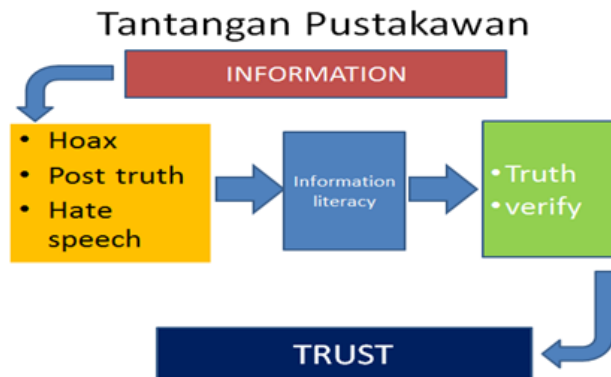
³ Sheila Corral, "Educating the Academic Librarian as a Blended Professional: A Review and Case Study," *Library Management*, 2010, 31.

⁴ Wiji Suwarno, *Etika Islam Dan Produktivitas Menulis Pustakawan PTKIN* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), 128.

2.3. Tantangan Pustakawan

Informasi berkembang begitu pesat, bahkan nyaris tidak dapat dibendung produksinya. Tidak sedikit informasi penting yang terlewat, dan tidak sempat tertangkap sebagai sesuatu yang penting dan bermakna. Informasi penting cenderung menjadi informasi sampah. Sebaliknya, justru terkadang informasi yang tidak penting dibuat sedemikian rupa sehingga terasa penting dan menjadi bahan konsumsi khalayak ramai.

Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi pustakawan yang mengaku sebagai profesional dalam hal informasi. benar atau tidak, masyarakat umum nanti yang akan menilai dan mengesahkan keprofesionalannya pustakawan. Era sekarang informasi mampu diproduksi sedemikian rupa, kebenaran mampu dijadikan sebuah pilihan alternatif, sementara kesalahan yang sebenarnya diketahui bahwa hal itu salah, bisa digunakan sebagai pembenar. Jika tidak berhati-hati, informasi yang sebenarnya baik, bisa jadi masuk dalam kerangka *hoax*, *post truth*, dan *bate speech*.



Gambar 2. Tantangan pustakawan

(modifikasi penulis)

Hoax dalam kamus Webster dikatakan sebagai *something accepted or established by fraud or fabrication*,⁵ yaitu sesuatu

⁵ "Definition of HOAX," accessed February 22, 2020, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/hoax>.

yang diterima dan dipahami dari hal yang tidak benar. Hoax lahir karena informasi yang tidak benar, tanpa data dan cenderung berefek pada penurunan tingkat kepercayaan atau *trust*. Hal ini berbahaya jika tidak dicegah dan dikendalikan. Pustakawan memiliki ilmu untuk menangkal ini dengan kompetensinya sebagai pustakawan yang *literary*.

Lain dengan hoax, Post truth juga menjadi problem pergulatan informasi. Menurut Oxford Dictionaries *post truth is defining it as where "objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief"*. Yaitu dimana pemikiran seseorang berada pada situasi yang lebih mempercayai emosi pribadi, kelompok dibanding dengan fakta objektif.

Sebagai contoh, jika sudah mengidolakan seseorang, orang akan cenderung mengikuti gaya, sikap, perilaku dan lain-lain dari idolanya, padahal ia sendiri paham jika apa yang dilakukan idola tersebut tidak benar. Sempelnya, era post truth adalah era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran dengan mempengaruhi emosi dan perasaan.

Hoax dan *post truth* bisa menjadi titik picu lahirnya *hate speech* bila informasi yang diterima tidak dimanajemen dengan baik. Kasusnya adalah karena kurangnya pengetahuan yang cukup untuk menfilter berbagai informasi yang masuk dan justru diterima secara apa adanya sehingga mempengaruhi emosi. Hoax, post truth, dan hate speech di era sekarang sudah menjangkiti masyarakat.

Menjadi tugas pustakawan dengan literasi informasi mendekonstruksi perannya agar sesuai dengan profesi mereka. Tugas itu adalah:

Pertama, Pustakawan memiliki tugas yang mulia yaitu pada pelayanan berorientasi pada keberdayaan pemustaka. Kedua, Pustakawan dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatur berbagai sumber daya informasi baik konvensional maupun elektronik untuk diberdayakan sebagai pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai pemustakanya. Ketiga,

Pustakawan paling memahami hal yang diinginkan pemustaka terkait dengan pengelolaan informasi dan pengetahuan dibanding dengan tenaga profesional lainnya. Dan keempat, Pustakawan dapat memberikan pelatihan, pendidikan, pendampingan dan lain-lain terkait dengan penelusuran informasi yang dikehendaki oleh pemustaka.

Pustakawan dianggap paling paham dan berpengalaman dalam hal manajemen pengetahuan dari mulai menelusur, memperoleh, memanfaatkan sampai dengan penyebaran informasi yang dikelolanya, tetapi tidak kalah pentingnya, 'sentuhan manusia' tetap menjadi faktor humanisme yang tidak dapat tergantikan dengan peralatan buatan manusia bentuk apapun dan secanggih apapun.⁶

Agar literasi informasi ini bisa maksimal dikuasai oleh pustakawan, harus dimulai sejak masih dalam proses belajar. Dengan kata lain, kurikulum menjadi titik masuk penguasaan literasi informasi. Shonrock mengemukakan integrasi literasi informasi ke dalam kurikulum perlu dilakukan karena akan mempunyai kekuatan bagi institusi pendidikan untuk memiliki komitmen kuat menjadikan *output* pembelajaran yang *literate*, kritis, memiliki keterampilan berpikir, dan solutif.⁷

Hemat saya, memang sejak di sekolah tingkat dasar, sudah saatnya dikenalkan dengan "indah"nya perpustakaan dan literasi informasi itu sendiri, bukan sebagai subjek, melainkan sebagai objek yang memahami pentingnya pengetahuan dan informasi.

Sertifikasi saat ini bagi pustakawan memang tidak berefek pada kesejahteraan secara langsung, melainkan berefek pada kekokohan dalam menyandang profesi sebagai pustakawan. Efek tidak langsungnya adalah pustakawan dipandang sebagai individu yang mampu menguasai berbagai kompetensi terkait dengan kepustakawanan dan dengan lantang berani meneriakkan "I am

⁶ K. Nageswara Rao and K. H. Babu, "Role of Librarian in Internet and World Wide Web Environment," *Informing Science* 4, no. 1 (2001): 30.

⁷ Lindstrom and Shonrock, "Faculty-Librarian Collaboration to Achieve Integration of Information Literacy," 20.

librarian”, tanpa harus malu-malu lagi melantangkan profesi yang disandangnya.

Mewujudkan pustakawan yang bersertifikasi bukan sesuatu yang mudah. Perhatikan tabel berikut ini:

Data kelompok pustakawan

Kategori	Sudah sertifikasi	Belum sertifikasi	Jumlah
Jawa Tengah	56	197	253
PTKIN	47	257	304
Universitas	100	292	392

Sumber: Data kelompok pustakawan tahun 2020

Pada tabel di atas dapat diketahui dari jumlah pustakawan dari tiga kategori pustakawan dari PT di Jawa Tengah, Pustakwan PTKIN dan Pustakawan dari univesitas secara umum di Indonesia. Diinformasikan dari data tersebut bahwa pustakawan yang sudah dan yang belum besertifikasi, masih dominan pustakawan yang belum bersertifikasi.

Dari perspekti LSP, terdapat kendala pelaksanaan sertifikasi pustakawan tersebut, diantaranya adalah *pertama*, kurangnya kesiapan Lembaga Sertifikasi Pustakawan (LSP) sebagai penilai sertifikasi. LSP ini belum siap secara maksimal berkaitan dengan SDM, anggaran, maupun Tempat Uji Kompetensi (TUK). Asesor yang menangani asesi belum cukup secara kuantitas. Asessor masih dilakukan oleh pusat yang harus melayani ribuan pustakawan yang tersebar di seluruh Indonesia baik yang bernaung di bawah lembaga Pemerintah maupun lembaga Swasta. Diklat Asessor juga dinilai belum sampai menjangkau di level daerah.

Kedua, anggaran belum memihak sesuai kebutuhan pelaksanaan assesment. Anggaran belum tersedia secara khusus, sehingga Pustakawan yang berminat mengikuti uji kompetensi masih harus membiayai dirinya sendiri *Ketiga*, pemahaman pustakawan terhadap urgensi sertifikasi pustakawan masih rendah, terlihat pada masih kurangnya minat dan motivasi. Pustakawan yang terdorong secara mandiri untuk mendaftar uji kompetensi. Sikap pragmatis Pustakawan yang sering membandingkan proses sertifikasi pustakawan yang tidak sama dengan sertifikasi profesi guru dan dosen yang mendapatkan tunjangan sertifikasi, menyebabkan masih banyak yang acuh tak acuh untuk mengikuti uji kompetensi tersebut, karena tidak berkorelasi langsung dengan pendapatan atau tunjangan mereka. *Keempat*, pustakawan belum memiliki dan memahami kurikulum dan bahan ajar berbasis unit kompetensi SKKNI, sehingga ketika diminta untuk mengikuti uji kompetensi, mereka merasa ragu dan tidak percaya diri

3. SIMPULAN

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pustakawan era sekarang dalam pengembangan kompetensi mampu menjadi pengajar, peneliti, pengelola taman baca masyarakat, wira usahawan, dan juga menjadi penulis. Pustakawan memerlukan keberanian untuk mengakui dan membuat dirinya diakui sebagai penyandang profesi pustakawan yaitu dengan memiliki tanda sahnya penguasaan kompetensi melalui sertifikasi pustakawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Sabri. "Sertifikasi Profesi Pustakawan Barometer Kompetensi Dan Produktivitas Pustakawan." *Jupiter* 14, no. 2 (2015).
- Corrall, Sheila. "Educating the Academic Librarian as a Blended Professional: A Review and Case Study." *Library Management*, 2010.
- "Definition of HOAX." Accessed February 22, 2020. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/hoax>.

- Lindstrom, Joyce, and Diana D. Shonrock. "Faculty-Librarian Collaboration to Achieve Integration of Information Literacy." *Reference & User Services Quarterly* 46, no. 1 (2006): 18–23.
- Naibaho, Kalarensi, and Diao Ai Lien. "Analisis Urgensi Sertifikasi Pustakawan Perguruan Tinggi." *Media Pustakawan* 23, no. 5 (2020): 1–21.
- Rao, K. Nageswara, and K. H. Babu. "Role of Librarian in Internet and World Wide Web Environment." *Informing Science* 4, no. 1 (2001).
- Suwarno, Wiji. *Etika Islam Dan Produktivitas Menulis Pustakawan PTKIN*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.